

EVALUASI PENETAPAN KAWASAN ANDALAN: STUDI EMPIRIS DI KALIMANTAN SELATAN 1993-1999¹

Hairul Aswandi

Alumnus Magister Ekonomika Pembangunan, UGM

Mudrajad Kuncoro

Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

This paper attempts to evaluate government policy to classify a region as a key region (kawasan andalan) with special reference to South Kalimantan province. Using location quotient and logistic regression, we showed that the policy designed and based merely on regional income per capita and key subsector. The policy seems, to ignore the growth of regional income and regional specialisation. Our analysis also suggests that regional classification based on Klassen Typology is a better alternative than that of the ad-hoc "key region".

Key words: *kawasan andalan, LQ, logistic regression, Klassen Typology*

PENDAHULUAN

Salah satu realitas pembangunan adalah terciptanya kesenjangan pembangunan antardaerah dan antarkawasan. Menyadari hal tersebut, pemerintah mencoba melakukan perubahan konsep pembangunan dari pendekatan sektoral kepada pendekatan regional sejak repelita VI. "Pendekatan pengembangan wilayah tersebut dilakukan melalui penataan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang bertujuan untuk mengembangkan pola dan struktur ruang nasional melalui pendekatan kawasan, dan dilaksanakan melalui penetapan kawasan andalan" (Witoelar, 2000).

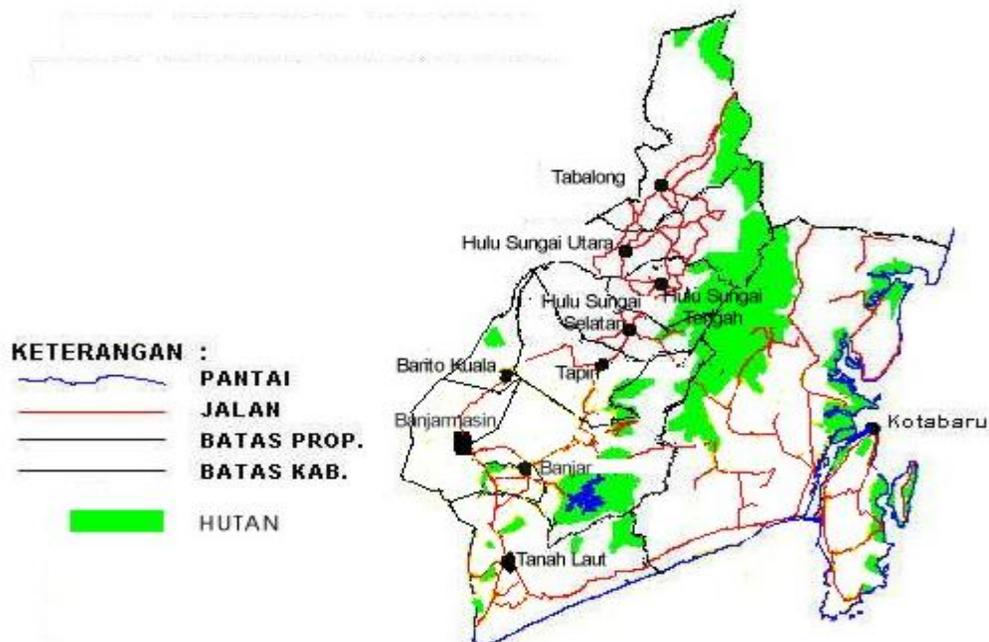
Perbedaan laju pembangunan antardaerah menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran dan kemajuan antardaerah, terutama antara Jawa dengan luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) (Haeruman 1996, 41:48; Kuncoro, 2002). Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk mempersempit ketimpangan regional adalah diterapkannya kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan andalan, yang dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Dengan kebijakan tersebut diharapkan terjadi keseimbangan tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita antarwilayah, sehingga dapat menutup atau paling tidak mempersempit *gap* antara perkembangan ekonomi antara daerah Jawa dan luar Jawa, dan antara KBI dan KTI.

¹ Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Mubyarto atas komentar-komentarnya yang konstruktif terhadap versi awal artikel ini.

Kawasan andalan merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah (*prime mover*), yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang cepat tumbuh dibandingkan lokasi lainnya dalam suatu Provinsi, memiliki sektor unggulan dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar (*hinterland*) (Royat, 1996:15). Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan dapat memberikan imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar (*hinterland*), melalui pemberdayaan sektor/subsektor unggulan sebagai penggerak perekonomian daerah dan keterkaitan ekonomi antardaerah. Penekanan pada pertumbuhan ekonomi sebagai arah kebijakan penetapan kawasan andalan adalah mengingat “pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel ekonomi yang

merupakan indikator kunci dalam pembangunan” (Kuncoro, 2000:18).

Kawasan andalan Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), terdiri dari kawasan andalan Banjarmasin, Batulicin-Kotabaru, dan Kandangan-Hulu Sungai Selatan. Penentuan kawasan andalan di Provinsi Kalimantan Selatan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Kebijakan lebih lanjut terhadap kawasan andalan Kalimantan Selatan adalah ditetapkannya KAPET Batulicin yang merupakan kawasan andalan dalam Kabupaten Kotabaru. Untuk memberikan gambaran mengenai letak kawasan andalan Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Lokasi Kawasan Andalan di Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan kriterianya, penetapan kawasan andalan semata-mata didasarkan pada aspek ekonomi, meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan adanya faktor lain di luar faktor ekonomi. Secara konseptual kebijakan pemerintah tersebut sangat efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, dalam upaya mengejar ketertinggalan pembangunan antardaerah. Meskipun demikian, penerapan di lapangan tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan kebijakan tersebut terutama dalam penetapan suatu daerah sebagai kawasan andalan. Akibatnya, kebijakan yang ditetapkan hanyalah sebagai simbol kepedulian terhadap realitas keterbelakangan yang dialami daerah, khususnya daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia.

Penelitian ini bertujuan: *pertama*, untuk mengetahui posisi perekonomian daerah-daerah di Kalimantan Selatan yang diukur melalui perbandingan tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita kabupaten/kota terhadap Provinsi Kalimantan Selatan. *Kedua*, menemukani subsektor ekonomi unggulan yang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian pada tiap kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. *Ketiga*, untuk mengetahui spesialisasi antardaerah di kawasan andalan, antardaerah kawasan andalan dengan kawasan bukan andalan, maupun antardaerah kawasan bukan andalan. *Keempat*, untuk mengetahui ketepatan penetapan kawasan andalan Kalimantan Selatan, dilihat dari kriteria persyaratannya. Untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian tersebut digunakan alat analisis Tipologi Klassen, *Location Quotient*, Indeks Spesialisasi Regional, Model Logit (*Binary Logistic Regression*), dan *Multinomial Logistic Regression*.

KONSEP KAWASAN ANDALAN

Konsep kawasan andalan memiliki relevansi yang sangat erat dengan konsep-konsep dan teori pembangunan regional. Dilihat dari kriteria penetapannya, konsep kawasan andalan

tersebut didukung teori pertumbuhan ekonomi, teori basis ekonomi, teori pusat pertumbuhan, dan teori spesialisasi.

Sebagai kawasan yang memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh dibandingkan dari daerah lainnya dalam suatu provinsi, berarti kawasan andalan memiliki faktor-faktor kelebihan yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi (*technological progress*) (Todaro 2000:115). Penciptaan peluang investasi dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh kawasan bersangkutan. Sektor/subsektor unggulan yang diukur dengan analisis *Location Quotient* (LQ) memiliki kesamaan dengan sektor ekonomi basis, yang pertumbuhannya menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan aktivitas-aktivitas lain (non basis) merupakan konsekuensi dari pembangunan menyeluruh tersebut (Soepono, 2000:41-53; Hoover, 1971). Basis ekonomi dari sebuah komunitas terdiri atas aktivitas-aktivitas yang menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja basis yang menjadi tumpuan perekonomian.

Semua pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh sektor basis. Penempatan kriteria pertumbuhan sebagai dasar penetapan kawasan andalan relevan dengan teori pusat pertumbuhan Perroux (1988) yang mengatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Ia menyatakan bahwa kota merupakan sutau "tempat sentral" dan sekaligus merupakan kutub pertumbuhan. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat, terutama daerah perkotaan, yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Kaitannya dengan sektor unggulan, Perroux mengatakan bahwa industri unggulan (*L'industrie matrice*) merupakan penggerak utama dalam pembangunan daerah, adanya sektor/industri unggulan memungkinkan dilakukannya pemusatan industri yang akan

mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antardaerah sehingga perkembangan industri di suatu daerah akan mempengaruhi perkembangan daerah lainnya. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri unggulan) dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung dari industri unggulan atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif (Arsyad 1999:147-148).

Keterkaitan perekonomian kawasan andalan dengan daerah sekitar sebagai salah satu kriteria penetapannya relevan dengan konsep spesialisasi. Adanya spesialisasi komoditas sesuai dengan sektor/subsektor unggulan yang dimiliki memungkinkan dilakukannya pemusatan kegiatan sektoral pada masing-masing daerah, yang akan mempercepat pertumbuhan di daerah. Menurut Samuelson dan Nordhaus (1995:34-35) masyarakat dapat lebih efektif dan efisien jika terdapat pembagian kerja, yang membagi keseluruhan proses produksi menjadi unit-unit khusus yang terspesialisasi. Ekonomi spesialisasi telah memungkinkan terbentuknya jaringan perdagangan antarindividu dan antarnegara yang demikian luas, yang merupakan ciri dari suatu perekonomian maju. Adanya keterkaitan ekonomi (spesialisasi) antardaerah yang mendorong proses pertukaran sesuai kebutuhan masing-masing, akan memungkinkan Bergeraknya perekonomian masing-masing daerah secara bersama-sama menuju proses pertumbuhan.

HASIL ANALISIS

1. Analisis Tipologi Klassen

Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator

utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Syafrizal, 1997: 27-38; Kuncoro, 1993; Hil, 1989).

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kabupaten/kota dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) *daerah cepat-maju dan cepa- tumbuh*, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan; (2) *daerah maju tapi tertekan*, daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan; (3) *daerah berkembang cepat* adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan. (4) *Daerah relatif tertinggal* adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan. Disebut “tinggi” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan; digolongkan “rendah” apabila indikator di suatu kabupaten/ kota lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan PDRB per kapita dan pertumbuhan PDRB untuk tiap kabupaten/kota selama periode 1993-1999, beserta rata-ratanya untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. PDRB Perkapita Harga Konstan Tanpa Migas Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan, 1993– 1999

KABUPATEN/KOTA	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Rata-Rata
Kotabaru	2.807.758	2.946.431	3.085.039	3.386.293	3.340.520	3.461.886	3.762.043	3.255.710
Banjarmasin	2.006.740	2.158.014	2.296.980	2.468.693	2.597.018	2.183.439	2.143.878	2.264.966
Hulu Sungai Selatan	1.120.438	1.184.708	1.247.630	1.323.111	1.364.696	1.285.455	1.313.604	1.262.806
Tanah Laut	1.548.782	1.632.631	1.678.378	1.763.889	1.717.625	1.484.973	1.501.170	1.618.207
Banjar	1.290.196	1.383.919	1.490.922	1.595.517	1.623.577	1.520.728	1.549.096	1.493.422
Barito Kuala	2.380.719	2.534.992	2.659.016	2.737.442	2.782.257	2.463.392	2.419.402	2.568.174
Tapin	1.194.036	1.261.083	1.329.311	1.423.572	1.466.919	1.392.484	1.529.442	1.370.978
Hulu Sungai Tengah	875.522	934.971	982.369	1.052.538	1.068.218	874.100	854.361	948.868
Hulu Sungai Utara	1.193.602	1.326.374	1.484.712	1.765.261	1.778.121	1.655.299	1.688.836	1.556.029
Tabalong	1.015.318	1.064.165	1.386.597	1.554.389	1.759.401	2.236.887	2.489.623	1.643.769
Kalimantan Selatan	1.656.639	1.771.274	1.886.004	2.034.025	2.091.616	1.945.707	2.017.542	1.914.687

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha, beberapa terbitan (diolah).

Tabel 2. Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan, 1993–1999 (Dalam %)

KABUPATEN/KOTA	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Rata-rata
Kotabaru	9,30	10,13	14,32	2,49	7,60	12,80	9,44
Banjarmasin	9,46	9,63	9,43	6,78	-14,65	-0,37	3,38
Hulu Sungai Selatan	6,04	6,96	6,48	3,26	-5,64	2,38	3,25
Tanah Laut	9,15	7,56	8,83	0,56	-10,74	4,32	3,28
Banjar	9,30	10,99	9,05	3,43	-4,86	3,46	5,23
Barito Kuala	8,95	8,50	5,31	3,68	-9,68	0,14	2,82
Tapin	6,68	7,71	8,19	3,87	-4,43	10,57	5,43
Hulu Sungai Tengah	7,24	6,82	7,62	1,64	-18,06	-2,18	0,51
Hulu Sungai Utara	12,01	13,38	20,04	0,84	-7,41	2,44	6,88
Tabalong	6,32	17,65	15,17	9,79	15,30	14,80	13,17
KALIMANTAN SELATAN	8,96	9,14	9,92	4,51	-6,42	5,41	5,25

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha, beberapa terbitan (diolah)

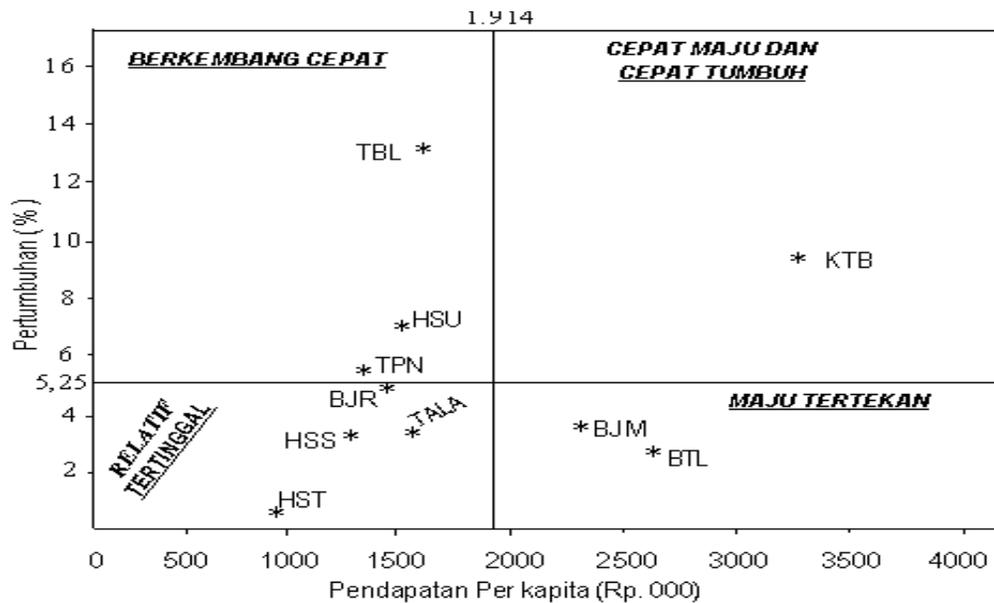
Dengan tipologi Klassen, kita dapat membagi kabupaten/kota di Kalimantan Selatan menjadi 4 klasifikasi (lihat Gambar 2). Kabupaten Kotabaru merupakan satu-satunya daerah kawasan andalan yang termasuk dalam kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh,

sedangkan dua daerah lainnya yaitu Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan masing-masing berada pada kategori daerah maju tapi tertekan dan daerah relatif tertinggal. Keadaan tersebut menunjukkan kurang tepatnya penetapan kawasan andalan

Kalimantan Selatan, dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu persyaratan penetapannya, terutama penetapan Kota Banjarmasin sebagai daerah maju tapi dengan tingkat pertumbuhan rendah, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berada pada klasifikasi daerah relatif tertinggal.

Daerah pada kawasan bukan andalan terbagi dalam tiga klasifikasi yang terdiri dari satu daerah berada pada klasifikasi daerah maju

tapi tertekan yaitu Kabupaten Barito Kuala. Sebanyak tiga daerah berada pada klasifikasi daerah berkembang cepat yang terdiri dari Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong. Daerah yang termasuk dalam kategori relatif tertinggal terdiri dari tiga daerah yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



Keterangan :

KTB = Kotabaru, BJR = Banjarmasin, HSS = Hulu Sungai Selatan,
 TALA = Tanah Laut, BJR = Banjar, BTL = Barito Kuala,
 TPN = Tapin, HST = Hulu Sungai Tengah, HSU = Hulu Sungai Utara,
 TBL = Tabalong.

Sumber: Tabel 1 dan 2

Gambar 2. Posisi Perekonomian Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan menurut Tipologi Kelasenn

Sebagai daerah cepat maju dan cepat tumbuh, Kabupaten Kotabaru memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi sepanjang periode penelitian dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Keberadaan Kabupaten Kotabaru pada

klasifikasi tersebut, tidak terlepas dari kemampuannya dalam menarik investasi. Nilai investasi yang berhasil diserap merupakan nilai terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 1986 sampai tahun 1999 yaitu sebesar Rp.1.295.483,8 juta (36,47%) untuk PMDN

dan US\$1.124 juta (82,49%) untuk PMA. Dilihat dari PDRB subsektor lapangan usaha, pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotabaru didukung terutama oleh struktur perekonomian yang terbukti cukup kebal terhadap tekanan krisis moneter. Struktur perekonomian Kabupaten Kotabaru menunjukkan, pertambangan tanpa migas sebagai pemberi sumbangan terbesar yang terbukti mampu mendorong pertumbuhan PDRB secara keseluruhan, di samping dua subsektor dominan lainnya yaitu perdagangan besar dan eceran dan perkebunan. Pertumbuhan ketiga subsektor tersebut terbukti mampu mendorong PDRB Kabupaten Kotabaru untuk tetap tumbuh positif pada saat terjadi krisis moneter yaitu 7,60% tahun 1998 dan 12,80% tahun 1999.

Kota Banjarmasin, sebagai daerah yang berada pada klasifikasi maju tapi tertekan, pada dasarnya memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi, hanya saja dalam beberapa tahun terakhir perekonomiannya mengalami tekanan akibat krisis moneter. Rentannya sektor penyangga perekonomian Kota Banjarmasin terhadap krisis moneter mengakibatkan terjadinya pertumbuhan negatif (penurunan) PDRB Kota Banjarmasin yaitu sebesar -14,65% pada tahun 1998 dan sebesar -0,37% pada tahun 1999. Subsektor yang mengalami tekanan krisis moneter tersebut adalah subsektor industri tanpa migas, bangunan, perdagangan besar dan eceran, dan pengangkutan. Dilihat dari struktur perekonomiannya, Kota Banjarmasin memiliki kesamaan dengan Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah maju tertekan lainnya dalam hal subsektor penopang perekonomiannya, yaitu subsektor industri tanpa migas. Meskipun demikian pola pertumbuhan kedua daerah tersebut menunjukkan adanya perbedaan, yaitu Kabupaten Barito Kuala memiliki pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sepanjang periode observasi.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai kawasan andalan yang berada pada klasifikasi daerah relatif tertinggal, berkaitan erat dengan rendahnya kegiatan pembangunan. Berdasarkan data tahun 1999, realisasi anggaran pembangunan daerah ini hanya sebesar 22,69% dari total pengeluarannya. Nilai realisasi anggaran pembangunan tersebut merupakan nilai terendah dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembangunan daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Rendahnya alokasi dana untuk kegiatan pembangunan tersebut menunjukkan kurangnya insentif untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nilai investasi yang berhasil diserap dari tahun 1968 sampai 1999 hanya berasal dari PMDN yaitu sebesar Rp. 17.496 juta atau 0,49% dari total investasi PMDN Provinsi Kalimantan Selatan, yang berarti rata-rata pertahunnya Rp. 564,38 juta. Selain dua kondisi yang kurang mendukung terhadap pertumbuhan dan pendapatan per kapita tersebut, ekonominya juga menunjukkan pertumbuhan negatif setiap tahunnya yang berdampak pada tertahannya laju pertumbuhan PDRB secara keseluruhan.

Daerah-daerah kawasan bukan andalan yang berada pada klasifikasi daerah berkembang cepat merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi, namun pendapatan per kapitanya lebih rendah. Tingginya pertumbuhan ekonomi daerah yang berada pada klasifikasi ini, didorong oleh pertumbuhan subsektor pertambangan di luar migas. Ketiga daerah dengan klasifikasi berkembang cepat tersebut (lihat Gambar 2) merupakan daerah penghasil tambang batubara dengan nilai yang lebih besar dibandingkan daerah di kawasan bukan andalan lainnya. Daerah-daerah kawasan bukan andalan yang berada pada klasifikasi daerah relatif tertinggal merupakan daerah-daerah yang memiliki basis pertanian, yang pertumbuhannya tidak mampu mengangkat pertumbuhan PDRB secara keseluruhan.

Berdasarkan pembahasan klasifikasi posisi perekonomian menurut Tipologi Klassen, maka keberadaan Kabupaten Kotabaru sebagai daerah cepat maju dan cepat tumbuh, selain tepat dinyatakan sebagai kawasan andalan, juga menunjukkan tepatnya Kabupaten Kotabaru sebagai wilayah KAPET, dibandingkan dengan dua daerah lainnya di kawasan andalan. Dilihat dari persyaratan pertumbuhan ekonomi, maka penetapan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai kawasan andalan menunjukkan ketidaktepatan penetapan kebijakan yang dijalankan pemerintah.

2. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis LQ digunakan untuk menentukan subsektor unggulan perekonomian daerah, yang mengacu pada formulasi Bendavid-Val (1991:74) berikut :

$$LQ = \frac{X_r / RV_r}{X_n / RV_n} \text{ atau } LQ = \frac{X_r / X_n}{RV_r / RV_n}$$

Keterangan :

- X_r = Nilai Produksi subsektor i pada daerah Kabupaten
- RV_r = Total PDRB Kabupaten
- X_n = Nilai Produksi subsektor i pada daerah Provinsi Kalimantan Selatan
- RV_n = Total PDRB Provinsi Kalimantan Selatan

Kriteria pengukuran LQ menurut Bendavid – Val, (1991:74) yaitu bila $LQ > 1$ berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah lebih besar dari sektor yang sama di tingkat nasional. Bila $LQ < 1$ berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah lebih kecil dari sektor yang sama di tingkat nasional, dan bila $LQ = 1$: berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah sama dengan sektor yang sama pada tingkat

nasional. Bila nilai $LQ > 1$ berarti subsektor tersebut merupakan subsektor unggulan di daerah dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Apabila nilai $LQ < 1$ berarti subsektor tersebut bukan merupakan subsektor unggulan dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah.

Analisis LQ menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota baik yang berada dalam kawasan andalan maupun pada kawasan bukan andalan, memiliki nilai LQ yang lebih besar dari satu pada beberapa subsektor lapangan usaha. Artinya, semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki subsektor unggulan dan penetapan kawasan andalan berdasarkan persyaratan sektor unggulan dapat dipandang tepat. Hasil perhitungan analisis LQ dapat ditunjukkan pada tabel 3.

Kesamaan subsektor unggulan dari kabupaten/kota di Kawasan Andalan yaitu, Kabupaten Kotabaru memiliki keunggulan yang sama dengan Kota Banjarmasin pada subsektor pengangkutan. Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki keunggulan yang sama pada subsektor perkebunan, perikanan, dan perdagangan besar dan eceran. Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki keunggulan yang sama pada subsektor air bersih, restoran dan swasta.

Dari 22 subsektor lapangan usaha tersebut, terdapat dua diantaranya yang bukan merupakan unggulan dan daya saingnya tidak dimiliki oleh daerah di kawasan andalan, yaitu subsektor peternakan dan penggalian. Hal tersebut menarik untuk dicermati dan diarahkan pada upaya terciptanya interaksi (pertukaran) antara daerah penghasil kedua subsektor tersebut dengan daerah di kawasan andalan. Daerah-daerah di kawasan andalan dalam hal ini dapat dijadikan pasar atas kedua komoditas tersebut.

Tabel 3. Perhitungan LQ Rata-Rata Kawasan Andalan dan Kawasan Bukan Andalan, 1993 - 1999

LAPANGAN USAHA	Kawasan Andalan			Kawasan Bukan Andalan						
	Kab KTB	Kota BJM	Kab HSS	Kab TALA	Kab BJR	Kab BTL	Kab TPN	Kab HST	Kab HSU	Kab TBL
Tanaman Bahan Makanan	0,49	0,02	2,82	1,93	1,22	1,39	2,73	1,54	1,06	1,28
Perkebunan	1,55	0,01	1,44	2,34	0,65	0,10	1,56	1,27	0,74	1,81
Peternakan	0,43	0,59	0,91	1,83	1,55	0,22	1,82	2,14	2,29	1,41
Kehutanan	1,92	0,00	0,31	1,31	1,92	0,10	1,55	0,27	0,70	3,44
Perikanan	1,67	0,05	1,44	1,51	0,75	0,73	0,97	1,11	1,25	0,43
Pertambangan Tanpa Migas	2,32	0,00	0,02	0,05	0,34	0,00	0,52	0,00	3,26	2,36
Penggalian	0,56	0,00	0,52	0,40	5,83	0,08	0,07	0,80	0,15	0,26
Industri Tanpa Migas	0,57	1,29	0,31	1,02	0,50	2,76	0,15	0,39	0,43	0,13
Listrik	0,27	1,98	0,40	0,43	2,53	0,08	0,38	0,51	0,31	0,42
Air Bersih	0,31	2,35	1,04	0,38	0,70	0,10	1,28	0,59	0,51	1,14
Bangunan	0,77	1,41	0,91	0,58	1,64	0,56	1,25	0,68	0,58	0,84
Perdagangan Besar & Eceran	1,15	0,95	1,11	1,18	1,44	0,35	0,98	0,98	0,81	0,99
Hotel	0,13	3,43	0,09	0,06	0,50	0,05	0,06	0,44	0,07	0,08
Restoran	0,16	1,20	2,30	0,72	1,28	0,31	2,92	1,59	1,17	0,95
Pengangkutan	1,29	2,06	0,58	0,23	0,66	0,16	0,30	0,71	0,44	0,26
Komunikasi	0,61	2,67	0,46	0,17	1,01	0,04	0,51	0,44	0,19	0,78
Bank	-0,03	3,95	0,28	0,15	-0,17	0,06	0,43	0,01	0,30	0,51
Lmb Keuangan Tanpa Bank	0,35	1,43	0,99	0,74	1,25	0,26	1,31	1,89	0,64	1,17
Sewa Bangunan	0,55	0,79	1,57	1,11	1,39	0,61	1,56	1,73	1,03	1,98
Jasa Perusahaan	0,05	3,06	0,33	0,07	1,16	0,12	0,19	0,26	0,34	0,79
Pemerintahan Umum	0,52	0,65	1,74	1,04	1,25	0,64	1,65	2,20	1,29	1,54
Swasta	0,27	1,56	1,16	0,73	1,59	0,37	1,08	1,49	0,80	0,84

Keterangan:

KTB = Kotabaru, BJM = Banjarmasin, HSS = Hulu Sungai Selatan,
 TALA = Tanah Laut, BJR = Banjar, BTL = Barito Kuala,
 TPN = Tapin, HST = Hulu Sungai Tengah, HSU = Hulu Sungai Utara,
 TBL = Tabalong.

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha, beberapa terbitan (diolah)

Seluruh kabupaten pada kawasan bukan andalan memiliki keunggulan yang sama dalam subsektor tanaman bahan makanan. Hal tersebut cukup beralasan jika dilihat dari pengalokasian kegiatan di Kalimantan Selatan. Daerah-daerah pada kawasan bukan andalan tersebut merupakan daerah yang dialokasikan sebagai pengembangan sektor pertanian.

Selain keunggulan yang dimiliki secara bersama-sama, tabel 3 juga menunjukkan subsektor yang keunggulan daya saingnya dimiliki setiap kabupaten/kota, baik yang berada pada kawasan andalan maupun di kawasan bukan andalan. Adanya perbedaan

daya saing atau keunggulan subsektor tersebut, sangat memungkinkan dilakukannya spesialisasi produksi antardaerah, sehingga membuka peluang pertukaran komoditas sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Implikasi dari hal tersebut adalah bahwa pertumbuhan suatu daerah akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan daerah lainnya. Peran pemerintah daerah untuk memberdayakan sektor unggulan sebagai penggerak perekonomian daerah sangat diperlukan, terutama dalam proses pertukaran komoditas antardaerah yang mendorong masuknya pendapatan dari luar ke daerah bersangkutan.

3. Analisis Spesialisasi Regional

Penggunaan alat analisis indeks spesialisasi regional adalah untuk mengetahui tingkat spesialisasi antardaerah di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan Indeks Krugman sebagaimana diterapkan oleh Kim (1995:881 – 908) untuk menganalisis spesialisasi regional di Amerika Serikat, yaitu:

$$Sj_{jk} = \sum_{i=1}^n \left| \frac{E_{ij}}{E_j} - \frac{E_{ik}}{E_k} \right|$$

Keterangan :

- SI_{jk} = Indeks Spesialisasi Kabupaten j dan k
- E_{ij} = PDRB Sektor i pada Kabupaten j
- E_j = Total PDRB Kabupaten j
- E_{ik} = PDRB Sektor i pada Kabupaten k
- E_k = Total PDRB Kabupaten k

Kriteria pengukurannya menurut Kim (1995:883) adalah “bila Indeks spesialisasi regional mendekati nol maka kedua daerah j dan k tidak memiliki spesialisasi, dan bila indeks spesialisasi regional mendekati dua maka kedua daerah j dan k memiliki spesialisasi”. Batas tengah antara angka nol dan dua tersebut adalah satu, oleh karena itu

nilai indeks spesialisasi yang lebih besar dari satu dapat dianggap sebagai sektor/subsektor yang memiliki spesialisasi. Untuk melihat tinggi rendahnya tingkat spesialisasi suatu daerah terhadap daerah lainnya, sebagai pembandingan dipergunakan nilai rata-rata indeks spesialisasi seluruh daerah.

Hasil perhitungan indeks spesialisasi menunjukkan adanya kenaikan nilai rata-rata indeks spesialisasi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,11 yaitu dari 0,74 pada tahun 1993 menjadi 0,85 pada tahun 1999. Kenaikan nilai rata-rata indeks spesialisasi tersebut didorong oleh kenaikan nilai rata-rata pada masing-masing daerah

Kenaikan rata-rata indeks spesialisasi kabupaten/kota pada kawasan andalan sebesar 0.07 sedangkan kawasan bukan andalan mengalami kenaikan sebesar 0.13. Hal tersebut menunjukkan kabupaten/kota pada kawasan bukan andalan memiliki perkembangan tingkat spesialisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan andalan. Secara rinci spesialisasi antardaerah di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel 4 dan tabel 5.

Tabel 4. Indeks Spesialisasi Regional Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan Tahun 1993

	KTB	BJM	HSS	TALA	BJR	BTL	TPN	HST	HSU	TBL	Rata-Rata	
KTB		0,98	0,85	0,70	0,70	1,20	0,92	0,87	0,54	0,89	0,85	
BJM			1,08	1,04	0,88	1,03	1,14	1,04	1,01	1,19	1,04	
HSS				0,43	0,57	1,05	0,32	0,23	0,41	0,46	0,60	
TALA					0,53	0,91	0,54	0,46	0,43	0,48	0,61	
BJR						1,08	0,54	0,52	0,49	0,55	0,65	
BTL							1,10	1,06	1,01	1,18	1,07	
TPN								0,39	0,49	0,45	0,65	
HST									0,40	0,42	0,60	
HSU										0,62	0,60	
TBL											0,69	
											Rata-Rata	0,74

Keterangan : KTB = Kotabaru, BJM = Banjarmasin, HSS = Hulu Sungai Selatan, TALA=Tanah Laut, BJR = Banjar, BTL=Barito Kuala, TPN=Tapin, HST=Hulu Sungai Tengah, HSU=Hulu Sungai Utara, TBL= Tabalong.

Sumber: Tabel 3 (data diolah)

Tabel 5. Index Spesialisasi Regional Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan Tahun 1999

	KTB	BJM	HSS	TALA	BJR	BTL	TPN	HST	HSU	TBL	Rata-Rata
KTB		1,09	0,92	0,93	0,77	1,30	0,90	0,77	0,63	0,73	0,89
BJM			1,02	0,83	0,87	1,05	1,15	0,96	1,26	1,35	1,06
HSS				0,61	0,52	1,11	0,30	0,37	0,81	0,98	0,74
TALA					0,67	0,67	0,62	0,60	0,86	0,99	0,75
BJR						1,09	0,49	0,48	0,75	0,82	0,72
BTL							1,19	1,08	1,19	1,33	1,11
TPN								0,46	0,81	0,78	0,74
HST									0,83	0,95	0,72
HSU										0,26	0,82
TBL											0,91
										Rata-Rata	0,85

Sumber: Tabel 3 (data diolah)

Spesialisasi antardaerah di kawasan andalan menunjukkan adanya kenaikan antara Kabupaten Kotabaru terhadap Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kenaikan indeks spesialisasi Kabupaten Kotabaru terhadap Kota Banjarmasin menunjukkan semakin terspesialisasinya subsektor usaha kedua daerah tersebut, sedangkan kenaikan Kabupaten Kotabaru terhadap Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum menunjukkan adanya spesialisasi. Nilai indeks spesialisasi Kota Banjarmasin terhadap Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan adanya penurunan tingkat spesialisasi.

Kenaikan indeks spesialisasi antardaerah di kawasan andalan dengan kawasan bukan andalan menunjukkan semakin terspesialisasinya kegiatan subsektor usaha Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Barito Kuala, sedangkan kenaikan nilai indeks spesialisasi Kabupaten Kotabaru terhadap tiga kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Tanah Laut, Banjar, dan Hulu Sungai Utara masih belum menunjukkan adanya spesialisasi. Hasil analisis juga menunjukkan semakin terdiversifikasinya subsektor usaha Kabupaten Kotabaru terhadap tiga kabupaten lainnya dalam kawasan bukan andalan yaitu Kabupaten

Tapin, Hulu Sungai Tengah, dan Tabalong yang ditunjukkan oleh penurunan nilai indeks spesialisasi, dengan nilai yang semakin mendekati nol.

Kenaikan indeks spesialisasi Kota Banjarmasin terhadap empat kabupaten di kawasan bukan andalan yaitu Kabupaten Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong, menunjukkan semakin terspesialisasi subsektor usaha Kota Banjarmasin terhadap keempat kabupaten tersebut. Selain itu, Kota Banjarmasin juga mengalami penurunan nilai indeks spesialisasi terhadap tiga kabupaten kawasan bukan andalan lainnya yaitu, Kabupaten Tanah Laut, Banjar, dan Hulu Sungai Tengah, yang berakibat semakin terdiversifikasinya subsektor usaha Kota Banjarmasin terhadap tiga kabupaten tersebut.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan adanya kenaikan indeks spesialisasi terhadap daerah di kawasan bukan andalan, kecuali terhadap Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar. Adanya penurunan nilai indeks spesialisasi ini berarti subsektor usaha Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap kedua kabupaten tersebut semakin terdiversifikasi. Kenaikan tersebut hanya berdampak pada semakin terspesialisasinya kegiatan subsektor usaha Kabupaten Hulu Sungai

Selatan terhadap Kabupaten Barito Kuala, sedangkan terhadap kabupaten lainnya masih belum menunjukkan adanya spesialisasi.

Spesialisasi antardaerah dalam kawasan bukan andalan menunjukkan adanya kenaikan indeks spesialisasi, kecuali antara Kabupaten Tanah Laut terhadap Barito Kuala, antara Kabupaten Banjar terhadap Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Tengah, dan antara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong, menunjukkan semakin terdiversifikasi subsektor usaha antardaerah tersebut.

Kenaikan nilai indeks spesialisasi yang menunjukkan semakin terspesialisasinya subsektor usaha antardaerah yang bersangkutan yaitu antara Kabupaten Barito Kuala terhadap Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong. Kabupaten lainnya pada kawasan bukan andalan meskipun mengalami kenaikan nilai indeks spesialisasi antardaerah, namun nilainya masih lebih mendekati nol dari pada dua, sehingga masih belum menunjukkan adanya spesialisasi.

Dilihat dari rata-rata indeks spesialisasi, pada tahun 1993 terdapat tiga daerah yang memiliki nilai lebih tinggi dari rata-rata indeks spesialisasi seluruh kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Kotabaru, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala. Ketiga daerah tersebut merupakan daerah maju menurut analisis Tipologi Klassen, yang berarti daerah maju lebih terspesialisasi dari daerah berkembang dan daerah tertinggal. Pada tahun 1999 Kabupaten Tabalong berhasil menyesuaikan diri dengan ketiga daerah tersebut dan bahkan tingkat spesialisasinya lebih tinggi dibandingkan kawasan andalan Kotabaru. Tingkat spesialisasi tertinggi dialami oleh Kabupaten Barito Kuala yang merupakan daerah di kawasan bukan andalan. Hasil analisis menunjukkan tingkat spesialisasi yang dimiliki bukanlah sebuah jaminan suatu daerah ditetapkan sebagai kawasan andalan, hal ini terlihat dari nilai rata-rata indeks spesialisasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang lebih

rendah dari sebagian besar daerah di kawasan bukan andalan sepanjang periode penelitian.

4. Daerah di Kalimantan Selatan: Dua atau Empat Klasifikasi?

Analisis untuk membedakan kinerja perekonomian kawasan andalan dan kawasan bukan andalan digunakan model logit atau *binary logistic regression*, sedangkan untuk melihat alternatif pengklasifikasian daerah di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, digunakan model *multinomial logistic regression*.

Analisis model logit atau *binary logistic regression*, dilakukan dengan menggunakan persamaan (Kuncoro, 2001 : 210) berikut ini:

$$\text{Prob (Y=0)} = 1 / [1 + \exp (b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3)]$$

di mana :

Y = Dummy Variabel, di mana 1 = Kawasan andalan; 0 = Kawasan bukan andalan

X₁ = Pertumbuhan PDRB

X₂ = PDRB per kapita

X₃ = Spesialisasi daerah

Dengan menggunakan variabel yang sama sebagaimana model logit di atas, maka analisis model regresi logistik multinomial untuk melihat alternatif pengklasifikasian daerah di Kalimantan Selatan dilakukan melalui persamaan berikut :

$$D4 = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

di mana

D4 = Klasifikasi kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yaitu:

1 = Daerah cepat maju dan cepat tumbuh

2 = Daerah maju tapi tertekan

3 = Daerah berkembang cepat

4 = Daerah relatif tertinggal

Berdasarkan hasil analisis logit, pengujian kecocokan model analisis menunjukkan bahwa pengujian model penuh dengan tiga variabel bebas dibandingkan dengan konstanta terbukti secara statistik bahwa sejumlah variabel penjelas mampu membedakan kawasan andalan dan kawasan bukan andalan. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai Chi-Square = 12,86 dengan derajat kebebasan (3, N=60) yang signifikan dengan $p < 0,01$ (lihat Tabel 6).

Tabel 6

Uji Kecocokan Model Kawasan Andalan dan Kawasan Bukan Andalan

	Chi-Square	df	Significance
Model	12,863	3	0,0049
Block	12,863	3	0,0049
Step	12,863	3	0,0049

Sumber: lihat lampiran 1 (diolah)

Kemampuan peramalan dari model yang digunakan cukup bagus, yaitu tingkat sukses total sebesar 76,67%, dengan 95,24% kawasan andalan dan 33,33% kawasan bukan andalan

mampu diramal secara benar (lihat Tabel 7). Meskipun kemampuan peramalan dari model logit di atas cukup bagus, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan peramalan dari model regresi logistik multinomial dengan menggunakan empat klasifikasi pilihan hasil. Tingkat sukses total peramalan model regresi multinomial sebesar 88,3%, dengan 100,0% daerah cepat maju, 100% daerah maju tertekan, 72,2% daerah berkembang, dan 91,7% daerah relatif tertinggal telah dapat diramalkan secara benar (lihat Tabel 8).

Hasil perbandingan kedua model klasifikasi daerah di Provinsi Kalimantan Selatan tersebut menunjukkan perlunya dilakukan klasifikasi daerah berdasarkan empat klasifikasi perkembangan perekonomian, di samping klasifikasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kawasan andalan dan kawasan bukan andalan, terutama untuk lebih fokusnya kebijakan pembangunan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan.

Tabel 7. Klasifikasi Kemampuan Prediksi Variabel Bebas terhadap Kawasan Andalan Dan Kawasan Bukan Andalan Provinsi Kalimantan Selatan

Observed		Predicted		Percent Correct
		Bukan Andalan B	Andalan A	
Bukan Andalan	B	40	2	95,24%
Andalan	A	12	6	33,33%
Overall				76,67%

Sumber: lihat lampiran 1 (diolah)

Tabel 8. Klasifikasi Kemampuan Prediksi Variabel Bebas terhadap Klasifikasi Daerah Alternatif

Observed	Predicted				Percent Correct
	Cepat Maju	Maju Tertekan	Berkembang	Tertinggal	
Cepat Maju	6	0	0	0	100,0%
Maju Tertekan	0	12	0	0	100,0%
Berkembang	0	0	13	5	72,2%
Tertinggal	0	0	2	22	91,7%
Overall Percentage					88,3%

Sumber: lihat lampiran 1 (diolah)

Hasil analisis model logit menunjukkan bahwa menurut kriteria Wald hanya variabel pendapatan per kapita (X2) yang dapat diandalkan untuk meramal kawasan andalan, dengan nilai statistik Wald sebesar 6,59 yang signifikan dengan $p < 0,05$ (lihat tabel 9). Hal tersebut berarti pendapatan per kapita memiliki pengaruh secara positif terhadap probabilitas suatu daerah berada pada kawasan andalan. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan perkapita maka semakin tinggi pula probabilitas suatu daerah berada di kawasan

andalan. Variabel pertumbuhan PDRB dan spesialisasi daerah menunjukkan keadaan yang tidak signifikan secara statistik yang berarti tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas suatu daerah berada pada kawasan andalan. Tingkat signifikansi tersebut menunjukkan bahwa pemilihan suatu daerah sebagai kawasan andalan di Provinsi Kalimantan Selatan tidak mempertimbangkan tingkat pertumbuhan PDRB dan spesialisasi daerah. Kriteria yang diacu dalam penetapan kawasan andalan hanya pendapatan per kapita saja.

Tabel 9. Persamaan Variabel, Koefisien Regresi, Standar Error, Statistik Wald dan Odds Ratio

Variabel	B	S.E	Wald	df	Sig	Exp(B)	95% CI for Exp (B)	
							Lower	Upper
X1	-0,0516	0,0484	1,1368	1	0,2863	0,9497	0,8637	1,0442
X2	2,02E-06	883E-07	6,5879	1	0,0103	1,0000	1,0000	1,0000
X3	-2,9064	3,0200	0,9262	1	0,3359	0,0547	0,0001	20,3425
Constant	-2,0853	1,7754	1,3795	1	0,2402			

Sumber : lihat lampiran 1 (diolah)

Hasil analisis model regresi logistik multinomial menunjukkan bahwa menurut kriteria statistik Wald, seluruh variabel penjelas pada klasifikasi cepat maju-cepat tumbuh dan maju tapi tertekan menunjukkan keadaan yang tidak signifikan dengan nilai statistik Wald 0,00 (lihat tabel 10). Hal ini berarti seluruh variabel peramal tidak memiliki pengaruh dan tidak dapat diandalkan untuk meramal klasifikasi daerah pada kedua klasifikasi tersebut. Kendati demikian, daerah dengan klasifikasi berkembang cepat memiliki dua variabel yang signifikan dengan $p < 0,05$ yaitu pertumbuhan PDRB dan indeks spesialisasi. Hal tersebut berarti pertumbuhan PDRB dan indeks spesialisasi memiliki pengaruh terhadap pengklasifikasian daerah sebagai daerah berkembang cepat. Variabel pendapatan per

kapita menunjukkan keadaan yang tidak signifikan dengan nilai statistik Wald sebesar 2,047 dan $p = 0,153$, yang berarti tidak memiliki pengaruh dan tidak dapat diandalkan untuk memprediksi pengklasifikasian daerah sebagai daerah berkembang. Dengan demikian hanya terdapat dua faktor penentu terhadap pengklasifikasian daerah sebagai daerah berkembang cepat yaitu, pertumbuhan PDRB dan spesialisasi antardaerah yang berpengaruh secara positif. Artinya apabila pertumbuhan PDRB naik sebesar 1% maka probabilitas suatu daerah berada pada klasifikasi daerah berkembang cepat akan naik sebesar 0,4%, dan apabila spesialisasi daerah naik sebesar 1% maka probabilitas suatu daerah berada pada klasifikasi daerah berkembang cepat naik sebesar 52,63%.

Tabel 10. Parameter Estimasi, Koefisien Regresi, Standar Error, Statistik Wald dan Odds Ratio

Klasifikasi		B	S.E	Wald	df	Sig	Exp(B)	95% CI for Exp (B)	
								Lower	Upper
Cepat Maju dan Tumbuh	Intercept	-39,809	0,000	,	0	,			
	GR	-0,598	2196,354	0,000	1	1,000	0,550	0,000	a
	PK	4,579E-05	0,009	0,000	1	0,996	1,000	0,983	1,017
	SI	-82,594	0,000	,	0	,	1,349E-36	,	,
Maju Tapi Tertekan	Intercept	-279,655	90800,017	0,000	1	0,998			
	GR	0,319	2720,308	0,000	1	1,000	1,376	0,000	a
	PK	-2,640E-05	0,077	0,000	1	1,000	1,000	0,861	1,162
	SI	365,659	247770,17	0,000	1	0,999	6,362+158	0,000	a
Berkembang Cepat	Intercept	-33,948	11,520	8,684	1	0,003			
	GR	0,400	0,159	6,335	1	0,012	1,492	1,093	2,037
	PK	-3,773E-06	0,000	2,047	1	0,153	1,000	1,000	1,000
	SI	52,263	18,656	7,847	1	0,005	4,98E+22	6562998,8	3,78E+38

Sumber: lihat lampiran 1 (diolah)

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Kesimpulan

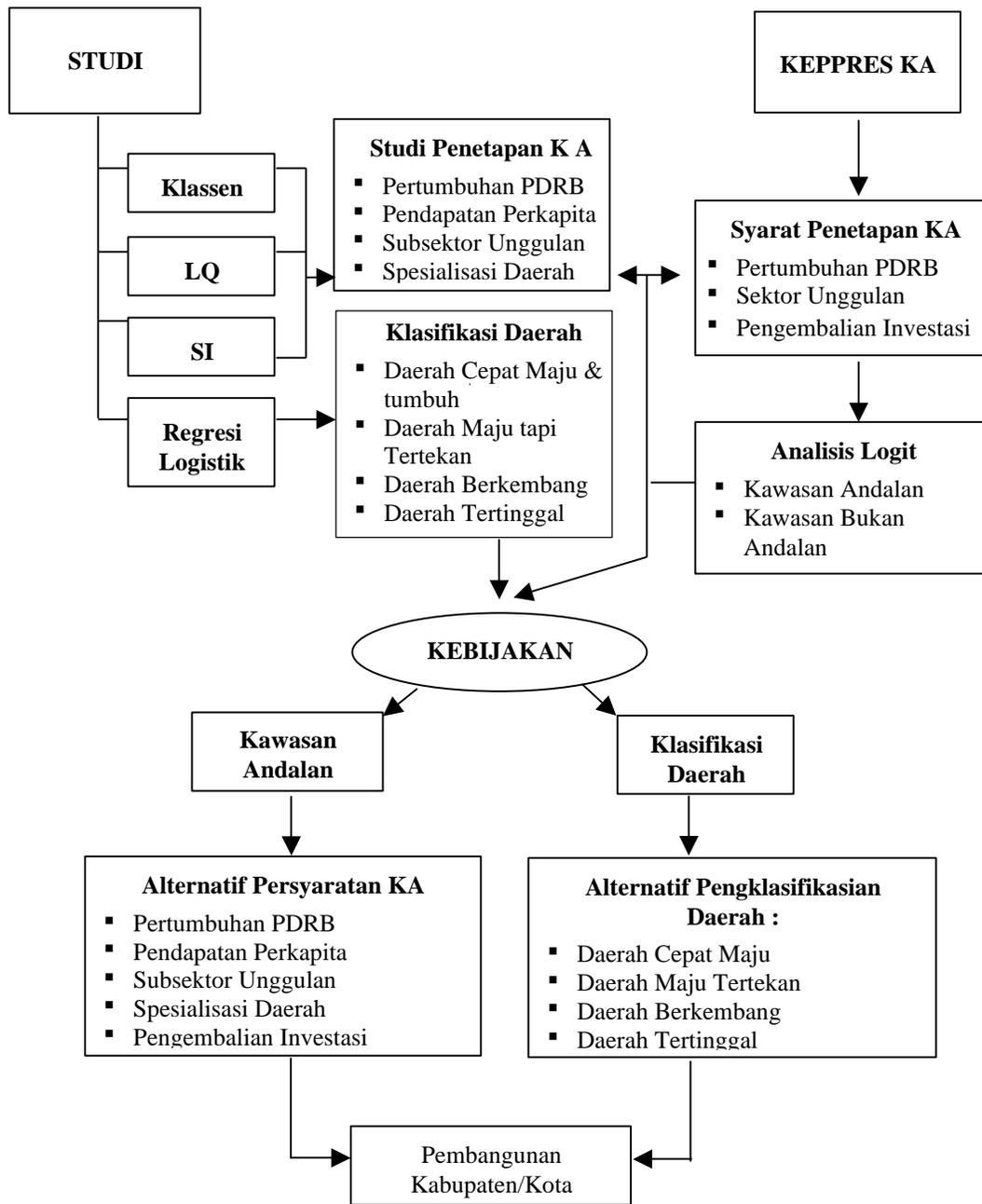
Hasil analisis mengenai evaluasi kebijakan penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan ditunjukkan pada gambar 3. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pertimbangan penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan hanya mengacu pada pendapatan per kapita dan subsektor unggulan, yang ditunjukkan oleh hasil analisis *location Quotient* dan *model logit*. Pertumbuhan PDRB dan spesialisasi daerah ternyata tidak menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan.

Analisis Tipologi Klassen menunjukkan, dari tiga daerah di kawasan andalan hanya Kabupaten Kotabaru yang berada pada daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh dengan tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita tinggi. Kota Banjarmasin merupakan daerah maju tapi tertekan dengan tingkat pertumbuhan rendah, sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan daerah dengan klasifikasi relatif

tertinggal dengan tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita rendah.

Hasil analisis spesialisasi regional menunjukkan bahwa kemampuan kawasan andalan sebagai daerah yang memiliki keterkaitan perekonomian (sektoral) dengan daerah lainnya masih lemah. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin terdiversifikasinya subsektor usaha daerah-daerah di kawasan andalan bahkan terjadi penurunan tingkat spesialisasi antar-daerah kawasan andalan selama tahun 1993-1999. Implikasi dari seluruh persyaratan yang harus dipenuhi adalah kebijakan penetapan kawasan andalan di Provinsi Kalimantan Selatan tidak tepat, terutama penetapan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hasil analisis pengklasifikasian daerah menunjukkan bahwa pengklasifikasian daerah di Provinsi Kalimantan Selatan lebih baik dengan menggunakan empat klasifikasi menurut Tipologi Klassen daripada hanya berdasarkan klasifikasi kawasan andalan dan kawasan andalan. Empat klasifikasi daerah tersebut yaitu daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal.



Keterangan :

KA = kawasan andalan LQ = Location Quotient SI = Spesialisasi Daerah

Gambar 3. Hasil analisis evaluasi penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan

2. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil-hasil analisis dapat ditarik implikasi kebijakan sebagai berikut. *Pertama*, menetapkan kebijakan pembangunan dan pengembangan sektoral perekonomian daerah, hendaknya lebih memprioritaskan subsektor unggulan yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota. Meskipun demikian subsektor lainnya tetap mendapat perhatian secara proporsional sesuai dengan potensi dan peluang pengembangannya. Pengembangan subsektor unggulan hendaknya diarahkan pada upaya untuk menciptakan keterkaitan antar-daerah dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui penciptaan spesialisasi yang memungkinkan Bergeraknya perekonomian secara bersama-sama melalui proses pertukaran komoditas antardaerah.

Kedua, diperlukan pemantauan dan evaluasi terhadap fungsi kawasan andalan sebagai *prime mover* dan *generator* bagi pertumbuhan perekonomian wilayah, sehingga keberadaannya benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan daerah sekitar.

Ketiga, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi pada kawasan andalan terutama Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berada pada klasifikasi daerah relatif tertinggal, diperlukan kebijakan yang dapat memberikan insentif bagi investasi di daerah tersebut. Insentif yang dapat diberikan adalah perbaikan prasarana, yang selama ini menghambat laju investasi di daerah tersebut. Kedekatan daerah ini dengan Kabupaten Kotabaru sebagai wilayah KAPET di Provinsi Kalimantan Selatan, harus dimanfaatkan kearah terciptanya interaksi perekonomian antara keduanya. Kemudahan dan potensi yang dimiliki KAPET hendaknya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan membuka jalan lintas yang dapat menghubungkan kedua daerah tersebut. Selain itu interaksi perekonomian

antara kawasan andalan Banjarmasin dengan kedua kawasan andalan tersebut juga tetap menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Keempat, selain menggunakan klasifikasi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat berupa kawasan andalan dan kawasan bukan andalan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga dapat menetapkan kebijakan pengklasifikasian daerah berdasarkan empat klasifikasi yaitu daerah cepat-maju dan tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Bendavid – Val, Avrom, 1991. *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*, Fourt Edition, New York, Praeger Publisher.
- Hill, H. (Ed.). (1989). *Unity and Diversity: Regional Economic Development in Indonesia since 1970*. Singapore: Oxford University Press.
- Hoover, E. M. 1971. *An Introduction to Regional Economics*. (1st ed.). New York: Alfred A. Knopf, Inc.
- Kim, Sukkoo, 1995. Expansion of Markets and The Geographic Distribution of Economic Activities: The Trends in U.S. Regional Manufacturing Structure 1860-1987, *The Quarterly Journal of Economics*, November, 881-908.
- Kuncoro, Mudrajad, 1993. Indonesia Menjelang Tahun 2000: Sebuah Renungan, *Analisis CSIS*, XXII(2), Maret-April.
- _____, 2000. *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah dan Kebijakan)*, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

- _____, 2001. *Metode Kuantitatif (Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi)*, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- _____, 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta (segera terbit).
- Perroux, F. (1988). The Pole of Development's New Place in a General Theory of Economic Activity. In B. Higgins & D. J. Savoie (Eds.), *Regional Economic Development: Essays in Honour of Francois Perroux*. Boston: Unwin Hyman.
- Republik Indonesia, 1997. *Peraturan Pemerintah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*, www.bappenas.go.id
- _____, 2000. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu*, www.bappenas.go.id
- _____, 2000. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha*, Tahun 1993-1999, BPS Propinsi Kalimantan Selatan.
- _____, 2000. *Kalimantan Selatan Dalam Angka*, BPS Propinsi Kalimantan Selatan.
- _____, 2000. *Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan*, Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan.
- Royat, Sujana, 1996. Pembangunan Ekonomi Regional dan Upaya Menunjang Pertumbuhan KAPET Dalam Kaitannya Dengan Kemitraan Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, *Manajemen Usahawan Indonesia*, No. 12, Tahun XXV 14-17
- Samuelson, Paul A and Nordhaus, William D, 1996. *Makroekonomi* (terjemahan oleh : Haris Munandar, dkk), Erlangga, Jakarta.
- Sjafrizal, 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, *Prisma LP3ES*, No 3 Tahun XXVI, 27-38
- Soepono, Prasetyo, 2001. Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi Ekonomi (Ekspor) : Posisi dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan Alat-Alat Analisis Regional, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 16, No.1, 41-53.
- Todaro, M.P, 2000. *Economic Development*, Seventh Edition, New York, Addition Wesley Longman, Inc.
- Witoelar, Erna, 2000. Pengelolaan Pantai Dan Pulau-Pulau Kecil Melalui Pendekatan Pengembangan Wilayah, *Lokakarya Nasional – Dies Natalis Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta.

LAMPIRAN 1.

Data Logit dan Logistik

Obs	X1	X2	X3	K	Klas	Obs	X1	X2	X3	K	Klas
1	9,30	2946631	0,82	1,00	1,00	31	8,95	2534992	1,07	0,00	2,00
2	10,13	3085039	0,80	1,00	1,00	32	8,50	2659016	1,08	0,00	2,00
3	14,32	3386293	0,80	1,00	1,00	33	5,31	2737442	1,08	0,00	2,00
4	2,49	3340520	0,79	1,00	1,00	34	3,68	2782257	1,09	0,00	2,00
5	7,60	3461886	0,90	1,00	1,00	35	-9,68	2463392	1,17	0,00	2,00
6	12,80	3762043	0,89	1,00	1,00	36	0,14	2419402	1,11	0,00	2,00
7	9,46	2158014	1,03	1,00	2,00	37	6,68	1261083	0,65	0,00	3,00
8	9,63	2296980	1,03	1,00	2,00	38	7,71	1329311	0,67	0,00	3,00
9	9,43	2468693	1,03	1,00	2,00	39	8,19	1423572	0,70	0,00	3,00
10	6,78	2597018	1,03	1,00	2,00	40	3,87	1466919	0,71	0,00	3,00
11	-14,65	2183439	1,10	1,00	2,00	41	-4,43	1392484	0,78	0,00	3,00
12	-0,37	2143878	1,06	1,00	2,00	42	10,57	1529442	0,74	0,00	3,00
13	6,04	1184708	0,62	1,00	4,00	43	7,24	934971	0,60	0,00	4,00
14	6,96	1247630	0,65	1,00	4,00	44	6,82	982269	0,62	0,00	4,00
15	6,48	1323111	0,68	1,00	4,00	45	7,62	1052538	0,65	0,00	4,00
16	3,26	1364696	0,67	1,00	4,00	46	1,64	1068218	0,67	0,00	4,00
17	-5,64	1285455	0,74	1,00	4,00	47	-18,06	874100	0,79	0,00	4,00
18	2,38	1313604	0,74	1,00	4,00	48	-2,18	854361	0,72	0,00	4,00
19	9,15	1632631	0,62	0,00	4,00	49	12,01	1326374	0,64	0,00	3,00
20	7,56	1678378	0,66	0,00	4,00	50	13,38	1484712	0,72	0,00	3,00
21	8,83	1763889	0,69	0,00	4,00	51	20,04	1765261	0,83	0,00	3,00
22	0,56	1717625	0,70	0,00	4,00	52	0,84	1778121	0,79	0,00	3,00
23	-10,74	1484973	0,77	0,00	4,00	53	-7,41	1655299	0,84	0,00	3,00
24	4,32	1501170	0,75	0,00	4,00	54	2,44	1688836	0,82	0,00	3,00
25	9,30	1383919	0,66	0,00	4,00	55	6,32	1064165	0,68	0,00	3,00
26	10,99	1490922	0,67	0,00	4,00	56	17,65	1386597	0,70	0,00	3,00
27	9,05	1595517	0,69	0,00	4,00	57	15,17	1554389	0,74	0,00	3,00
28	3,43	1623577	0,71	0,00	4,00	58	9,79	1759401	0,77	0,00	3,00
29	-4,86	1520728	0,74	0,00	4,00	59	15,30	2236887	0,88	0,00	3,00
30	3,46	1549096	0,72	0,00	4,00	60	14,80	2489623	0,91	0,00	3,00

Keterangan :

X1 = Pertumbuhan PDRB, X2 = Pendapatan Perkapita,

X3 = Indeks Spesialisasi, K = Kawasan,

Klas = Klasifikasi Daerah menurut Tipologi Klasen.

Sumber: Diolah dari Tabel 1-5